

Peran Dinas Sosial Kota Surabaya dalam Mendukung Program Pelayanan Kesehatan Bagi Lansia

The Role of the Surabaya City Social Service in Supporting Health Service Programs for the Elderly

Rukmini¹, Oktarina¹ dan Astridya Paramita¹

¹ Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan,
Kementrian Kesehatan RI, Jl. Percetakan Negara No. 29 Jakarta Indonesia 10560 Kotak Pos 4444 JKT 1400,
Telp (021) 4243314, Faksimili (021) 42871604

E-mail: imas_yatno@yahoo.co.id

Naskah diterima 17-4-2020 direvisi 18-3-2021 disetujui

Naskah diterima 17 April 2020, direvisi 18 Maret 2021, disetujui

Abstract

The percentage of elderly population in Indonesia in five decades (1971-2017), has increased about twofold, namely 8.97 percent (23.4 million people). The number of elderly people in East Java is in the third rank of 12.16% in Indonesia, while in the City of Surabaya it reaches 227,527 people (7.90 percent). A special program for the elderly for their survival in order to stay healthy and productive is needed. This study aims to analyze the role of the Social Service in supporting health service programs for the elderly in the city of Surabaya. The method used is qualitative research with a case study approach. Data collection through in-depth interviews and focus group discussions. The results showed that the policies and regulations related to the welfare and health of the elderly were available and implemented through the social service program by the Surabaya City Social Service. The program is in the form of providing food, gymnastics, family building for the elderly, training or technical entrepreneurship guidance and UPTD Griya Wredha. The implementation of the program did not encounter any significant obstacles because the Mayor of Surabaya's commitment was very high, so that the City of Surabaya received the title as Senior Friendly City. The Social Service plays a very important role in supporting health services, both in collaboration with the Health Office, Puskesmas, Posyandu for the Elderly and in cross-sector partnership activities through Elderly Friendly Cities. It takes commitment, partisanship and high concern as well as adequate funding support from the local government for the success of the welfare service program for the elderly, as shown by the City of Surabaya.

Keywords: Social Service, Policy, Elderly Health Service

Abstrak

Persentase penduduk lanjut usia di Indonesia dalam lima dekade (1971-2017), meningkat sekitar dua kali lipat yaitu 8,97 persen (23,4 juta jiwa). Jumlah Lansia di Jawa Timur menempati peringkat ketiga sebesar 12,16% di Indonesia, sedangkan di Kota Surabaya mencapai 227.527 jiwa (7,90 persen). Program khusus bagi Lansia untuk kelangsungan hidupnya agar tetap sehat dan produktif sangat dibutuhkan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Sosial dalam mendukung program pelayanan kesehatan pada Lansia di Kota Surabaya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan *focus grup discussion*. Hasil penelitian menunjukkan perangkat kebijakan dan regulasi terkait kesejahteraan dan kesehatan Lansia telah tersedia dan diimplementasikan melalui program pelayanan sosial oleh Dinas Sosial Kota Surabaya. Program tersebut berupa pemberian permakanan, senam, bina keluarga lanjut usia, latihan atau bimbingan teknis kewirausahaan dan UPTD Griya Wredha. Pelaksanaan program tidak mendapatkan hambatan yang berarti karena komitmen Walikota Surabaya sangat tinggi, sehingga Kota Surabaya mendapatkan predikat sebagai Kota Ramah Lansia. Dinas Sosial sangat berperan dalam mendukung pelayanan bidang kesehatan, baik dalam kegiatan kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, Posyandu Lansia dan kegiatan kemitraan lintas sektor melalui Kota Ramah Lansia. Diperlukan komitmen, keberpihakan dan kepedulian yang tinggi serta dukungan alokasi dana yang memadai dari pemerintah daerah untuk keberhasilan program pelayanan kesejahteraan Lansia, seperti yang telah ditunjukkan oleh Kota Surabaya.

Kata Kunci: Dinas Sosial, Kebijakan, Kesehatan Lansia

Pendahuluan

Keberhasilan pencapaian pembangunan nasional ditandai dengan perbaikan kualitas kesehatan masyarakat yang berdampak pada meningkatnya usia harapan hidup, tercermin dari semakin meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia atau Lansia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Penduduk Lanjut Usia adalah penduduk berumur 60 tahun ke atas (Republik Indonesia, 1998).

Persentase penduduk Lansia di Indonesia meningkat sekitar dua kali lipat (1971-2017) yaitu 8,97 persen (23,4 juta), dimana Lansia perempuan (9,47%) lebih banyak dibandingkan Lansia laki-laki (8,48%). Pada tahun ini sudah ada lima provinsi yang memiliki struktur penduduk tua yang mana penduduk Lansianya sudah mencapai 10 persen yaitu DI Yogyakarta (13,90%), Jawa Tengah (12,46%), Jawa Timur (12,16%), Bali (10,79%) dan Sulawesi Barat (10,37%). Jumlah penduduk Lansia (lanjut usia) di Indonesia terus bertambah setiap tahun, hingga pertengahan tahun 2019, mencapai 25 juta jiwa atau lebih dari 9% jumlah penduduk Indonesia (BPS RI, 2018).

Jawa Timur mempunyai persentase penduduk Lansia di perkotaan sebesar 11,66 persen dan di perdesaan sebesar 13,50 persen. Proporsi penduduk Lansia terbesar berada di Kota Surabaya yaitu sebesar 7,90 persen dari total populasi 2.848.583 jiwa. Kondisi ini menjadikan Kota Surabaya masuk sebagai kota dengan kategori berpenduduk tua (BPS RI, 2018).

Peningkatan jumlah Lansia juga diikuti dengan Usia Harapan Hidup (UHH) yang juga meningkat (Amalia, Ni'mal, & Mury, 2014). Upaya peningkatan kualitas hidup Lansia perlu dipahami sebagai kebutuhan spesifik Lansia dengan memenuhi kebutuhan fisik, psikis dan kebutuhan sosial (Kiik, Sahar, & Permatasari, 2018). Untuk menangani permasalahan Lansia diperlukan tindakan nyata untuk meningkatkan kualitas hidup Lansia agar para Lansia tetap

sejahtera secara lahir maupun bathin. Untuk itu diperlukan kepedulian berbagai pihak, baik dari pemerintah, lembaga swasta, masyarakat dan dari keluarga Lansia sendiri.

Pemerintah Kota Surabaya bersama Dinas Sosial Kota Surabaya telah membuat kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup Lansia melalui beberapa program bagi Lansia sangat miskin dan terlantar, yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya. Dinas Sosial Kota Surabaya mempunyai bidang rehabilitasi sosial yang membawahi 2 seksi yaitu (1)seksi rehabilitasi tuna sosial anak dan Lansia; (2) Seksi rehabilitasi sosial daerah kumuh dan penyandang cacat. Selain itu Dinas social juga memiliki kebijakan dan regulasi terkait penyelenggaraan program Lansia yang menjadi acuan program Dinas Sosial Kota Surabaya. Pelaksanaan program pelayanan kesejahteraan sosial, Dinas Sosial bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Posyandu Lansia dalam mendukung pelayanan kesehatan bagi Lansia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji peran Dinas Sosial Kota Surabaya dalam mendukung program pelayanan kesehatan bagi Lansia.

Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis peran Dinas Sosial dalam mendukung program pelayanan kesehatan pada Lansia. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan *focus groups discussion*. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Surabaya dan Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Anak dan Lansia serta staf, untuk memberikan informasi tentang program pelayanan dan perlindungan Lansia yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Informan lainnya adalah Kepala Bidang Kesehatan

Masyarakat dan Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat (KGM) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Kesehatan Kota Surabaya untuk memberikan informasi tentang program pelayanan kesehatan pada Lansia yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Jumlah informan seluruhnya berjumlah 8 orang. Pengumpulan data dilakukan juga dengan telaah dokumen kebijakan dan regulasi terkait. Analisis data secara deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan program.

Hasil Dan Pembahasan

1. Kebijakan Program Lansia

Dinas Sosial Kota Surabaya dalam penyelenggaraan program Lansia, mempunyai seksi yang menangani tentang Lansia yaitu seksi rehabilitasi tuna sosial anak dan Lansia. Demikian pula telah ada kebijakan dan regulasi yang menjadi acuan, sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah Kota Surabaya No.3 tahun 2014 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Pasal 5, menyatakan setiap Lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan yang maha Esa. Untuk meningkatkan kesejahteraan Lansia berhak mendapatkan pelayanan keagamaan dan mental spiritual; pelayanan kesehatan; pelayanan pendidikan dan pelatihan; kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum; kemudahan dalam layanan bantuan hukum; perlindungan sosial; bantuan sosial. pada Pasal 7. Peningkatan kesejahteraan sosial Lansia menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, keluarga dan masyarakat sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing.
- b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan, pada Pasal 27 menyampaikan kemudahan hubungan ke dan dari di dalam bangunan gedung meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman bagi disabilitas dan Lansia

- c. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin yang Dibiayai APBD Kota Surabaya, sasaran dari peraturan walikota tersebut termasuk didalamnya lanjut usia miskin.
- d. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Perlengkapan Pemakaman Bagi Keluarga Miskin Kota Surabaya, sebagai sasaran peraturan walikota tersebut termasuk lanjut usia.
- e. Keputusan Walikota Surabaya No.188.45/226/436.1.2/2017 tentang Komisi Daerah Lanjut Usia Masa Jabatan Tahun 2017 -2019.
Dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut usia di Kota Surabaya dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan pusat, Pasal 2, ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 60 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam penanganan lanjut usia di daerah dan Perda No. 3 tahun 2014 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, perlu dibentuk komisi daerah lanjut usia di Kota Surabaya dengan keputusan kepala daerah.
- f. Peraturan Walikota Surabaya No. 78 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Makanan di Kota Surabaya.

Sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan bagi fakir miskin dan/atau terlantar di Kota Surabaya agar memperoleh kehidupan yang layak, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Permakanan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2017.

Sasaran kegiatan pemberian permakanan adalah penduduk daerah yang terdiri dari : a. penyandang disabilitas; b. Penyandang Penyakit Tertentu; c. lanjut usia; d. anak terlantar; dan/

atau e. anak yatim dan/atau piatu dari keluarga fakir miskin.

Pemberian permakanan khususnya kepada Lansia adalah Lansia miskin yang terlantar. Pemberian permakanan dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya melalui Karang werda di setiap kelurahan yang dibentuk berdasarkan SK Kelurahan. Oleh karena itu diperlukan peraturan yang mendukung kegiatan tersebut yaitu :

1. SK pembentukan Karang Werda oleh Lurah.
2. Nota kesepahaman pengadaan makanan melalui swakelola antara Dinas Sosial Kota Surabaya dengan Karang Werda
3. Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara Dinas Sosial dengan penanggung jawab kelompok masyarakat pelaksana swakelola karang werda.
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi UPTD Griya Werdha yang telah diganti oleh Peraturan Walikota Surabaya Nomor 84 Tahun 2016, yang menaungi pendirian UPTD Griya Werdha sebagai tempat rehabilitasi lanjut usia miskin dan/atau terlantar.

Perangkat kebijakan merupakan legalitas bagi pemangku kepentingan dalam menyusun strategi dan program kegiatan. Perangkat kebijakan juga memberikan kepastian hukum dan memperkuat komitmen antara penyelenggara, pelaksana, dan masyarakat dalam kegiatan pelayanan bagi masyarakat. Adanya Perda Nomor 3 Tahun 2014 tersebut menjadi langkah penting Kota Surabaya dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan kota ramah lanjut usia. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2017 merupakan kebijakan yang sudah ditetapkan sehingga menjadi pedoman pelaksanaan dan pengelolaan program permakanan guna mewujudkan tujuan sebagai upaya perlindungan dan jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa permakanan bagi lanjut usia bagi fakir miskin dan atau terlantar.

Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009, pasal 138 disebutkan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan Lansia ditujukan agar Lansia tetap sehat, produktif secara sosial dan ekonomis. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi melalui upaya peningkatan kesejahteraan dengan pemberdayaan Lansia sehingga mampu berperan dalam pembangunan dengan memperhatikan fungsi, ketrampilan, usia dan kondisi fisik (Republik Indonesia, 2009). Kebijakan sebagai tindakan yang direkomendasikan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu terhadap kebijakan untuk mengatasi dan mencapai suatu tujuan atau merealisasikan sasaran dan maksud tertentu yang dijabarkan dalam program kegiatan (Suwitri, 2008). Studi menemukan bahwa dengan keberadaan berbagai kebijakan/regulasi, tersedianya kelompok/kelembagaan terkait Lansia dan komitmen kepala daerah yang tinggi menjadikan Kota Surabaya berpeluang besar untuk dapat menyandang predikat kota ramah Lansia (Vibriyanti, 2018).

2. Program Lansia di Dinas Sosial Kota Surabaya

Berdasarkan wawancara dengan informan diketahui bahwa program kesehatan telah terakomodir dalam program pelayanan sosial bagi Lansia yang telah dilaksanakan oleh Dinas sosial Kota Surabaya selama ini. Beberapa kegiatan program pelayanan sosial bagi Lansia yang telah dijalankan oleh Dinas Sosial di Kota Surabaya yaitu

- a. Program pemberian makanan pada Lansia
Program ini dijalankan oleh Walikota Surabaya berdasarkan SK Perwali sejak tahun 2012, merupakan program yang pertama kali di Indonesia untuk memberikan makanan pada Lansia miskin dan terlantar. Pemberian makanan berupa nasi kotak dengan mengantarkan pada pagi hari ke rumah Lansia, sebagai makanan tambahan,

diharapkan dapat membantu meringankan beban Lansia sesuai ketersediaan anggaran Dinsos Surabaya yaitu 11.000/orang sebanyak 20.000 jiwa penduduk.

Pelaksanaan pemberian permakanan ini, Dinas Sosial bekerjasama dengan Karang Werda di setiap Kelurahan, yang dibentuk berdasarkan SK Kepala Kelurahan, yang didasarkan pada nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dengan penanggung jawab Karang werda. Tim Karang Werda yang akan bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran pemberian makanan pada Lansia di Kelurahan masing-masing.

Pernyataan Informan Dinas Sosial

“ ... Program ini dijalankan oleh Walikota Surabaya berdasarkan SK Perwali sejak tahun 2012, merupakan program yang pertama kali di Indonesia untuk memberikan makanan pada Lansia. Bu Wali keinginannya membangun manusianya bukan hanya gedung-gedung atau jembatan tetapi bu Wali juga ingin membangun dari manusianya sendiri. Permakanan bagi Lansia miskin dan terlantar, yaitu sejumlah 20.000 orang, seharga 11.000 dengan mempertimbangkan kebutuhan gizi-kami punya ahli gizi, dan diberikan sekali dalam sehari berupa nasi kotak. Untuk pengirimannya, dinsos kerjasama dengan Karangweda yang ada di kelurahan. Karangweda yang ada di kelurahan itu sudah..”.

Dari segi pembiayaan program di Dinas Sosial Kota Surabaya sudah sangat mencukupi dan tidak ada kekurangan biaya untuk program. Program pemberian permakanan ini terus berlanjut sampai sasaran Lansia meninggal dunia atau sasaran sudah pindah ke luar kota Surabaya atau sudah mampu. Jika Lansia sudah tidak menjadi sasaran pemberian permakanan harus dibuat berita acara dan surat pernyataan dari sasaran Lansia. Program pemberian makanan yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya, menjadi percontohan bagi Kabupaten dan Kota lain di Indonesia.

b. Kegiatan lomba untuk menambah aktifitas dan kreatifitas Lansia.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk lomba pada Lansia seperti lomba menyanyi, jalan sehat, gerak jalan dan asah trampil Lansia.

c. Kegiatan senam Lanjut Usia

Kegiatan senam rutin satu bulan sekali di setiap kecamatan, yang dilakukan di taman Lansia setiap hari sabtu dan minggu serta senam yang dilaksanakan di RSUD Bhakti Dharma Husada untuk lanjut usia di sekitar rumah sakit. Semua kegiatan tersebut tidak dipungut biaya.

d. Kegiatan bina keluarga lanjut usia

Merupakan pembinaan dan pelatihan kepada keluarga atau masyarakat yang di lingkungan keluarganya terdapat lanjut usia (khususnya lanjut usia yang perlu mendapatkan perhatian khusus).

e. Pelatihan atau bimbingan teknis (Bimtek) kewirausahaan bagi warga pra purna (menjelang pensiun) yang pesertanya merupakan lanjut usia.

f. Pembinaan usaha mikro kecil dan menengah untuk masyarakat lanjut usia produktif. Pembinaan yang dilakukan meliputi : pemasaran, fasilitasi pameran, display produk dan design produk.

g. UPTD Griya Werdha. UPTD Griya Werdha berfungsi sebagai sarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi lanjut usia miskin dan terlantar.

Hasil menunjukkan bahwa pemberian makanan pada Lansia dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya bekerjasama dengan Karang Werda. Pembentukan Karang Werda telah diatur pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2017. Karang Werda merupakan wadah kegiatan untuk peningkatan aktivitas Lansia sehingga mampu mengembangkan diri dalam fungsi sosial dan ekonominya. Pemerintah Kota Surabaya dan Dinas Sosial Kota Surabaya menjadikan Karang Werdha sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mendistribusikan dan

mengkoordinasikan program bantuan serta sarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi lanjut usia dan miskin terlantar.

Berbagai program Lansia yang telah dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan Lansia, agar tetap sehat dan sejahtera secara lahir maupun batin. Program jalan sehat, senam dan asah trampil Lansia, merupakan program untuk peningkatan kesehatan Lansia. Senam bermanfaat untuk memperlancar peredaran darah, kesehatan paru dan jantung, meningkatkan daya tahan dan kekuatan otot, mengurangi resiko terjadinya penyakit degeneratif seperti tekanan darah tinggi dan mengurangi kecemasan dan depresi. Hasil penelitian, menunjukkan senam Lansia sangat bermanfaat terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi Lansia, baik tekanan darah sistol maupun diastol (Izhar, 2017), peningkatan keseimbangan tubuh Lansia (Manangkot, Sukawana, & Witarsa, 2016), meningkatkan fungsi kognitif Lansia (Putri, Nurrachmah, Gayatri, & Kes, 2018) dan memperkuat paru dan jantung (Pribadi, 2015).

Program Dinas Sosial Kota Surabaya lainnya adalah Bina Keluarga Lansia (BKL), merupakan kegiatan pembinaan untuk Lansia dan keluarga yang memiliki lanjut usia yang meliputi 1) Aspek fisik misalnya melakukan olahraga ringan seperti jalan kaki, senam, sesuai dengan kondisi fisik dan usia; 2) Aspek psikis misalnya cemas, takut dengan kelemahan fisik, sakit, kehilangan pergaulan, takut tersingkir secara sosial dari lingkungannya; 3) Aspek kesejahteraan spiritual yaitu kedekatan dengan Tuhan, berpikir positif dan bersyukur dengan hidup (Kania, 2019). Data dari Pengendalian Kependudukan BKKBN menunjukkan hingga saat ini diperkirakan di Kota Surabaya terdapat sekitar 6.837 Bina Keluarga Lansia (BKL) dengan 327.854 keluarga yang terlibat.

Menurut Nurul Khotimah, dkk (2012), setiap Lansia mengalami berkurangnya fungsi organ tubuh secara normal yang menyebabkan adanya peningkatan kerentanan

dan ketergantungan dengan orang lain (Khotimah, Gunardo, Ghufron, Sugiharti, & Aryekti, 2017). Oleh karena itu, secara individu maupun kolektif penduduk Lansia diharapkan mampu mengembangkan potensi agar dapat meningkatkan kemampuannya dalam berbagai kegiatan, baik sosial, ekonomi, maupun politis. Lansia perlu memiliki sumber pendapatan untuk mendukung kehidupan agar sejahtera. Pada tahun 2019, persentase lansia bekerja mencapai 49,39 persen, dengan kata lain, 1 dari 2 Lansia masih bekerja di usia tuanya. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia lanjut tetap produktif di masa tua (BPS RI, 2019). Untuk itu, program di Kota Surabaya telah diadakan pelatihan/bimbingan tehnik (Bimtek) oleh Dinas Sosial yang diikuti lanjut usia, pra purna (menjelang pensiun), untuk membantu para lanjut usia menjadi wirausaha.

Program Dinas Sosial lainnya adalah menyediakan fasilitas UPTD Griya Werdha, merupakan panti jompo milik pemerintah yang disediakan gratis untuk Lansia dengan berbagai fasilitas. Program pelayanan kesehatan juga dilakukan pada Panti tersebut yaitu pemeriksaan kesehatan secara rutin.

Untuk meningkatkan kualitas hidup Lansia maka Lansia harus memiliki interaksi sosial yang baik sehingga Lansia tidak akan merasa kesepian dalam hidupnya. Hasil penelitian di UPTD Griya Werdha Kota Surabaya sebagian besar memiliki penyakit kronik yang diderita serta memiliki status hubungan sosial dan kualitas hidup yang buruk. Kesimpulan penelitian tersebut, bahwa interaksi sosial berhubungan dengan kualitas hidup Lansia, semakin buruk interaksi sosial Lansia maka semakin rendah pula kualitas hidupnya (Andesty & Syahrul, 2019). Hasil penelitian Ikawaty (2013) menunjukkan, ada pengaruh antara pengisian waktu luang terhadap kebahagiaan lanjut usia, sebesar 65,676 % dan faktor lainnya sebesar 34,324 % yaitu variabel kegiatan santai (4,567 %), kegiatan sosial (14,580 %), kegiatan kreativitas (0,037 %), kegiatan rohani (2,242

%), oleh karena itu diperlukan program yang melibatkan lanjut usia agar merasa diperhatikan, dihargai, berguna dan memberi kesempatan berperan dalam pembangunan (Ikawati, 2013).

Hasil penelitian Monika (2016), menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berkontribusi pada Lansia untuk mendapatkan layanan sosial adalah jenis kelamin wanita, berusia 85 tahun atau lebih, penghasilan rendah dan menderita penyakit kronis (Burzynska, Bryla, Bryla, & Maniecka-Bryla, 2016). Penelitian Stefan (2019) menunjukkan bahwa ada hubungan antara faktor sosial ekonomi dengan rendahnya derajat kesehatan di usia tua yang meliputi faktor pendidikan, pekerjaan dan pendapatan rumah tangga (Sieber et al., 2019). Penelitian lainnya menunjukkan, kualitas hidup Lansia dipengaruhi oleh faktor klinis, sosiodemografi dan sosial ekonomi. Kualitas hidup Lansia yang baik ditunjukkan dengan rasa puas atas hidupnya, depresi yang lebih sedikit,

pendapatan yang cukup, secara subjektif merasa kesehatannya lebih baik, mampu beraktivitas fisik, tidak adanya gangguan fungsional dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial (Conde-Sala, Portellano-Ortiz, Calvó-Perxas, & Garre-Olmo, 2017). Program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya sudah mengakomodir hal tersebut, dengan menyediakan untuk menjamin kesejahteraan sosial dan pelayanan kesehatan terutama bagi Lansia miskin dan terlantar.

3. Hambatan Program

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa tidak ada hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program pelayanan pemberian makanan bagi Lansia karena dukungan Walikota Kota Surabaya sangat tinggi. Hambatan yang ditemui diuraikan pada Tabel 1. dibawah ini.

Tabel 1.
Hambatan Program Pemberian Makanan Bagi Lansia di Dinas Sosial Kota Surabaya, Tahun 2019.

No.	Kendala	Keterangan
1.	Program permakanan	Pada awal program terjadi kesalahpahaman aparat hukum bahwa ada duplikasi program pemberian permakanan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan pemberian makanan tambahan pada Posyandu Lansia yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Pada hakikatnya, kedua program tersebut merupakan hal yang berbeda karena sasaran Posyandu Lansia adalah seluruh Lansia dengan memberikan makanan tambahan berupa kue untuk setiap Lansia yang berkunjung di Posyandu Lansia pada saat jadwal Posyandu, sedangkan sasaran program permakanan hanya Lansia miskin dan terlantar dengan pemberian nasi kotak sekali setiap hari.
2.	Data Lansia miskin dan terlantar	Pada awal program terjadi ketidaktepatan sasaran karena menggunakan data Lansia miskin yang bersumber dari basis data terpadu, yang belum terverifikasi dengan baik. Sejak tahun 2019, sasaran Lansia miskin untuk program permakanan menggunakan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Data tersebut bersumber dari pendataan masyarakat miskin dan terlantar yang dilakukan oleh Kelurahan, yang telah diverifikasi oleh Dinas Sosial Kota Surabaya.
3.	SDM	Sumber daya manusia (SDM) yang bertugas dalam pemberian permakanan di Karang Werda, sangat bervariasi dalam hal kompetensi dan kepedulian terhadap Lansia. Kondisi tersebut mempengaruhi pelaksanaan program, tetapi secara umum SDM yang terpilih dianggap sukses untuk melaksanakan program pemberian makanan di Kota Surabaya.

Sumber: Data Primer Wawancara

Berdasarkan wawancara, diperoleh informasi bahwa Dinsos sudah melakukan pemetaan dan verifikasi sasaran masyarakat miskin dan terlantar dengan menggunakan data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan pelayanan program permakanan tersebut. Setelah dilakukan proses verifikasi, kemudian data sasaran tersebut dikoordinasikan

ke Karang Werda, yang akan menyalurkan pemberian makanan kepada sasaran sesuai tanggung jawab di Kelurahan masing-masing.

Pernyataan Informan Dinas Sosial

"...Sasaran permakanan oleh Dinsos khusus yang miskin dan terlantar, kalau yang mampu ya tidak. Data orang miskin dimasukkan dalam data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Jadi benar-benar miskin, pendapatannya dibawah upah minimum. Data MBT berasal dari usulan lurah, disertai surat keterangan miskin. Untuk mendapatkan permakanaan, data dimasukkan ke form MBR, dilaporkan ke Dinsos, kemudian Dinsos melakukan klarifikasi di lapangan...”

4. Peran Dinas Sosial Dalam Program Kesehatan

Dinas Sosial Kota Surabaya telah berperan dalam mendukung program kesehatan baik secara tidak langsung, melalui program pelayanan kesejahteraan sosial bagi Lansia, maupun secara langsung melalui kerjasama yang dilakukan dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Posyandu Lansia, melalui program Kota Ramah Lansia yang dicanangkan oleh Kota Surabaya.

Pernyataan Informan Dinas Sosial

“...Bu Wali sudah menganggarkan katakanlah untuk ramah Lansia bagaimana dengan semua UPTD yang ada di Kota Surabaya ini sehingga sudah ada sinkronisasi. Dengan adanya pelaksanaan kegiatan kami yang ada di Dinsos ini, harapan pemerintah Kota Surabaya menjadikan Lansia semakin sehat, semakin kuat dan semakin mandiri sehingga mereka diterima di lingkungannya masing-masing ...”

Peran Dinas Sosial dalam program pelayanan kesehatan Posyandu Lansia yang dikoordinir oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas, dalam bentuk ikut serta dalam sosialisasi kepada Lansia tentang jadwal kegiatan pelaksanaan Posyandu Lansia.

Pernyataan Informan Dinas Kesehatan Kota Surabaya

“ ... Dinkes mengadakan kegiatan Posyandu, kita juga woro-woronya sering-sering melalui Dinsos, jadi kita selalu bersinergi apalagi kalau kota ramah Lansia. Kota Ramah Lansia itu kita kolaborasi dengan dinas-dinas lainnya juga...”

Dinas Sosial juga terlibat dalam program kesehatan melalui kegiatan asuhan mandiri Toga (tanaman obat keluarga), yang dilaksanakan

oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas Santun Lansia.

Pernyataan Informan

“... Dinkes selama ini sudah mengajak pada pada Lansia-Lansia di Kota Surabaya melalui puskesmas setempat, itu menanam Toga. Setelah menanam Toga bagaimana cara mengolah supaya menjadi ramuan yang menyehatkan bagi Lansia itu sendiri...”

Menurut Dinas Sosial Kota Surabaya, potensi pelayanan kesehatan tradisional (Yankestrad) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas bagi Lansia sangat bagus, seperti yang disampaikan berikut :

“... Sangat perlu sekali dari pada obat-obat yang mengandung kimia, saya kira secara pribadi itu lebih bagus, apalagi dari tanamannya sendiri itu lebih bagus lagi. Setahu saya itu programnya Dinkes melalui puskesmas setempat mereka sudah memberi pelatihan-pelatihan untuk wilayahnya masing-masing...”

Peran Dinas Sosial lainnya dalam bidang pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui program Kota Ramah Lansia yaitu Taman Lansia dan Taman Palliatif. Dalam kegiatan Taman Lansia, melibatkan seluruh UPTD terkait, seperti pernyataan informan berikut ini.

“...Oh ya satu lagi dipemerintahan Kota Surabaya ada namanya Taman Lansia itu, bu Wali menghendaki supaya difungsikan untuk senam Lansia dan pengobatan gratis, pada saat hari sabtu dan minggu. Melibatkan UPTD-UPTD, untuk pengerahannya dari Dinsos untuk pengerahan Lansianya, untuk pengobatannya Dinkes, untuk pengamanannya Litbanglinmas, pengobatan gratis pada sabtu minggu pagi, ada juga Taman Paliatif untuk Lansia, ada batu-batu khusus untuk pijat...”

Peran Dinas Sosial Kota Surabaya dalam bidang pelayanan kesehatan tercermin dalam Program Kota Ramah Lansia. Program tersebut telah didukung berbagai regulasi, mulai dari Perda, Perwali Kota Surabaya dan pembiayaannya serta seluruh UPTD dan

lintas sektor terkait sesuai tupoksinya masing-masing. Dalam bidang kesehatan, telah tersedia Taman Lansia dan Taman Palliatif. Sedangkan program Dinas Kesehatan Kota Surabaya adalah pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis pada hari Sabtu dan Minggu di Posyandu Lansia. Kemitraan Dinas Sosial dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya pada kegiatan Posyandu Lansia dan pelayanan kesehatan tradisional khususnya dalam asuhan mandiri Toga.

Hasil kajian Rukmini, dkk (2019), menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan tradisional mempunyai potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai salah satu model pelayanan kesehatan pada Lansia. Adapun potensi Yankestrad untuk Lansia yaitu 1) Minat Masyarakat tinggi, ditunjukkan dengan Data Riskesdas, proporsi rumah tangga yang pernah memanfaatkan Yankestrad dalam satu tahun mengalami peningkatan dari 30,1% pada tahun 2013 meningkat menjadi 31,4 % pada tahun 2018. Proporsi pemanfaatan Yankestrad pada penduduk Lansia di Indonesia cukup tinggi sebesar 37%; 2) Data BPS menunjukkan peningkatan jumlah Lansia di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 9,7 jt jiwa, pada tahun 2025 diprediksi meningkat sebesar 12,54 juta jiwa (BPS RI, 2019); 3) Masalah penyakit degeneratif yang banyak diderita oleh Lansia, Yankestrad relatif aman dan efek samping ringan untuk pengobatan dan pemeliharaan dalam jangka panjang, selama dilakukan Yankestrad profesional; 4) Beban polifarmasi pada Lansia, sehingga metode Yankestrad dapat mengurangi beban polifarmasi; 5) Yankestrad memenuhi kriteria berlatar belakang budaya, sehingga akan lebih mudah diterima di kalangan Lansia; 6) Bersifat promotif dan preventif, yang berperan sebagai penunjang pengobatan konvensional sehingga pelayanan bisa dilakukan secara simultan (Rukmini et al., 2019).

Peran Dinas Sosial Kota Surabaya dengan Dinas Kesehatan dan lintas sektor lainnya, diwujudkan dan dilaksanakan dalam bingkai program Kota Ramah Lansia. Dalam program

tersebut, semua UPTD di Kota Surabaya melaksanakan kegiatan dan kemitraan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Kota Ramah Lansia harus memenuhi 4 syarat yaitu 1) Memiliki seperangkat peraturan yang mengatur tentang Lansia; 2) Memiliki pemimpin daerah yang berkomitmen dan berpedulian terhadap Lansia; 3) Memiliki metode dokumen yang ramah Lansia tetapi disesuaikan dengan keadaan daerahnya (WHO - World Health Organization, 2007); 4) Memiliki fasilitas yang ramah terhadap Lansia (Hermawati, 2015).

Hasil studi Kapasitas Kota Ramah Lanjut Usia 2013, yang dilakukan SurveyMETER & CAS UI (2013), Kota Surabaya meraih skor 46,3, lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional 42,9 dari kemungkinan skor 100 (SurveyMETER dan CAS UI, 2013). Prestasi tersebut menempatkan Kota Surabaya menjadi salah satu kota ramah lanjut usia. Namun demikian, pencapaian skor yang paling rendah adalah pada dimensi partisipasi sipil dan pekerjaan sebesar 13,8. Dimensi ini menunjukkan masih rendahnya dukungan pengambil kebijakan di sektor pemerintah dan swasta dalam menyediakan lapangan kerja pada Lansia. Untuk mengatasi kondisi tersebut Dinas Sosial Kota Surabaya melakukan kegiatan program berupa pembinaan usaha mikro kecil dan menengah meliputi pemasaran, fasilitas pameran, display produk dan design produk.

Penutup Kesimpulan

Perangkat kebijakan dan regulasi di Dinas Sosial Kota Surabaya telah tersedia dan diimplementasikan dalam berbagai program kesejahteraan sosial Lansia yang sangat mendukung program pelayanan kesehatan yaitu pemberian permakanan, senam, bina keluarga lanjut usia, latihan atau bimbingan teknis kewirausahaan dan UPTD Griya Werdha. Dinas Sosial sangat berperan dalam mendukung pelayanan bidang kesehatan, baik dalam kegiatan kerjasama dengan Dinas

Kesehatan, Puskesmas, Posyandu Lansia dan kegiatan kemitraan lintas sektor dalam wadah Kota Ramah Lansia. Pelaksanaan program tidak mendapatkan hambatan yang berarti karena komitmen Walikota Surabaya sangat tinggi, sehingga Kota Surabaya mendapatkan predikat sebagai Kota Ramah Lansia.

Rekomendasi

Suatu program perlu adanya komitmen, keberpihakan dan kepedulian yang tinggi serta didukung dengan anggaran alokasi dana dari pemerintah daerah, khususnya Walikota Surabaya, merupakan salah satu kunci kesuksesan suatu kebijakan dan program bagi kesejahteraan Lansia. Diharapkan Kota Surabaya dapat menjadi contoh bagi Kabupaten dan Kota Lainnya dalam mengembangkan program pelayanan kesejahteraan sosial bagi Lansia

Ucapan Terimakasih

Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya dan jajarannya, khususnya Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Surabaya dan Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Anak dan Lansia yang telah membantu, memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan menyediakan dokumen terkait. Kami mengucapkan terimakasih kepada Kepala Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan yang telah memberikan dukungan pembiayaan terlaksananya penelitian ini. Semoga tulisan ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya terkait dengan peran Dinas sosial Kota Surabaya dalam mendukung program kesehatan bagi Lansia.

Pustaka Acuan

Amalia, Y., Ni'mal, B., & Mury, R. (2014). Perbedaan kualitas hidup lansia yang tinggal di komunitas dengan di pelayanan sosial lanjut usia. *Jurnal Pustaka Kesehatan*, 2(1), 87–94. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

Andesty, D., & Syahrul, F. (2019). HUBUNGAN INTERAKSI SOSIAL DENGAN KUALITAS HIDUPLANSIADIUNITPELAYANANTERPADU

(UPTD) GRIYA WERDHA KOTA SURABAYA TAHUN 2017. *The Indonesian Journal of Public Health*, 13(2), 171. <https://doi.org/10.20473/ijph.v13i2.2018.171-182>

- BPS RI. (2018). *Statistik Penduduk Lanjut Usia Indonesia 2018. Subdirektorat Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial. BPS. Jakarta.* (M. S. Dwi Susilo, M. S. Ida Eridawaty Harahap, S.Si., & M. S. Raden Sinang, SST, Eds.). Jakarta: bdirektorat Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial BPS.
- BPS RI. (2019). *Statistik Penduduk Usia Lanjut 2019.* (M. S. Dwi Susilo, M. S. Ida Eridawaty Harahap, S.Si., & M. S. Raden Sinang, S.ST., Eds.), *Badan Pusat Statistik.* Jakarta: Subdirektorat Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial BPS.
- Burzynska, M., Bryla, M., Bryla, P., & Maniecka-Bryla, I. (2016). Factors determining the use of social support services among elderly people living in a city environment in Poland. *Health and Social Care in the Community*, 24(6), 758–768. <https://doi.org/10.1111/hsc.12259>
- Conde-Sala, J. L., Portellano-Ortiz, C., Calvó-Perxas, L., & Garre-Olmo, J. (2017). Quality of life in people aged 65+ in Europe: associated factors and models of social welfare—analysis of data from the SHARE project (Wave 5). *Quality of Life Research*, 26(4), 1059–1070. <https://doi.org/10.1007/s11136-016-1436-x>
- Hermawati, I. (2015). Kajian tentang Kota Ramah Lanjut Usia. *Kajian Tentang Kota Ramah Lanjut Usia*, (April), 1–10. Retrieved from http://eprints.uny.ac.id/20570/1/MAKALAH_KOTA_RAMAH_LANJUT_USIA.UNY.ISTIANA.pdf
- Ikawati. (2013). Pengaruh Pengisian Waktu Luang terhadap Kebahagiaan Lanjut Usia, *12(1)*, 27–44. <https://doi.org/10.31105/jpks.v12i1.1245>
- Izhar, M. D. (2017). Pengaruh Senam Lansia Terhadap Tekanan Darah Di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Luhur Jambi. *Jiubj*, 17(1), 204–210. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v17i1.116>
- Kania, D. (2019). Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) Untuk Kesejahteraan Spiritual Lanjut Usia: Penelitian di Kampung KB RW 07 Kelurahan Cipadung Kulon Kecamatan Panyileukan Kota Bandung. *Diploma Thesis, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.* <https://doi.org/10.16309/j.cnki.issn.1007-1776.2003.03.004>
- Khotimah, N., Gunardo, G., Ghufro, A., Sugiharti, S., & Aryekti, K. (2017). LANJUT USIA (LANZIA) PEDULI MASA DEPAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *Geomedia: Majalah Ilmiah Dan Informasi Kegeografian*, 14(2). <https://doi.org/10.21831/gm.v14i2.13815>

- Kiik, S. M., Sahar, J., & Permatasari, H. (2018). Peningkatan Kualitas Hidup Lanjut Usia (Lansia) Di Kota Depok Dengan Latihan Keseimbangan. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 21(2), 109–116. <https://doi.org/10.7454/jki.v21i2.584>
- Manangkot, M., Sukawana, W., & Witarsa, M. (2016). PENGARUH SENAM LANSIA TERHADAP KESEIMBANGAN TUBUH PADA LANSIA DI LINGKUNGAN DAJAN BINGIN SADING. *COPING NERS (Community of Publishing in Nursing)*, 4(1).
- Pribadi, A. (2015). PELATIHAN AEROBIK UNTUK KEBUGARAN PARU JANTUNG BAGI LANSIA. *Jurnal Olahraga Prestasi*, 11(2), 116756. <https://doi.org/10.21831/jorpres.v11i2.5729>
- Putri, D. M. P., Nurrachmah, P. E., Gayatri, D., & Kes, S. M. (2018). Pengaruh Latihan Senam Otak Dan ART Therapy Terhadap Fungsi Kognitif Lansia Dengan Demensia Di PSTW Yogyakarta Unit Budi Luhur Dan Abiyoso. *INA- RXIV Papares*, Juli, 1–7. <https://doi.org/10.31227/osf.io/db3a9>
- Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 2, 1–77.
- Rukmini, Oktarina, Mariani, H., Kristiana, L., Paramita, A., Kusumawati, L., ... Prabaningrum, V. (2019). Kajian Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi di UPF Inovasi Teknologi Kesehatan. Laporan penelitian UPF Inovasi Teknologi Kesehatan, Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan. Surabaya.
- Sieber, S., Cheval, B., Orsholits, D., Van Der Linden, B. W., Guessous, I., Gabriel, R., ... Cullati, S. (2019). Welfare regimes modify the association of disadvantaged adult-life socioeconomic circumstances with self-rated health in old age. *International Journal of Epidemiology*, 48(4), 1352–1366. <https://doi.org/10.1093/ije/dyy283>
- SurveyMETER dan CASUI. (2013). *Satu Langkah Menuju Impian Lanjut Usia 2030 Kota Surabaya*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1080/00034989760581>
- Suwitri, S. (2008). Konsep Dasar Kebijakan Publik. *Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang*, 1(1), 1–51. Retrieved from https://dlwqtxts1xze7.cloudfront.net/57623163/PDFkebijakan_publik.pdf?1540354548=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DKonsep_Dasar_Kebijakan_Publik.pdf&Expires=1597025682&Signature=XlpPtoyDiTdAuGbNRaVbiD8KMhx6naUWBvYCKXLQ26ro0Kwlm7DNvbMxHv
- Vibriyanti, D. (2018). Surabaya Menuju Kota Ramah Lansia: Peluang Dan Tantangan (Surabaya Toward Age-Friendly City: Opportunities and Challenges. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 13(2), 117–132.
- WHO - World Health Organization. (2007). *Global Age-friendly Cities: A Guide*, 1–76.

